



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

TAHUN 2025

UPTD TPI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sultan Hadiwijaya No 53 Tlp. 0291.685368

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadiwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 DEMAK 59511



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NAMA SOP : PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI UPTD TPI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami administrasi surat menyurat.
2. Bisa mengendarai sepeda motor.
3. Mempunyai pengetahuan tentang rute jalan.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan
2. ATK dan komputer
3. Berkas Permohonan
4. Dokumen persyaratan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika terjadi keterlambatan akan mengakibatkan penarikan retribusi jadi terlambat
1. Pembuatan naskah Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)
2. Penandatanganan SPK

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Penyewa	BPD Jateng	Bendahara Penerimaan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyewa	Mulai			-	-	-	Menerima, memeriksa, dan membaca
2	Surat Tanda Setoran (STS)				-	15 Menit	STS	
3	Kasda	selesai			-	1 Hari kerja	Berkas terima	


 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Demak
 P. Rahang Tasunar DN., MM.
 NIP. 196702101993031009